



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petrokimia Gresik serta Dirut Perum Jasa Tirta II.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	6 (enam)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Januari 2018
W a k t u	:	Pukul 16.50 s.d 19.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG) didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra); 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan)
Hadir	:	30 dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI. 1. Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI 2. Para Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petrokimia Gresik serta Dirut Perum Jasa Tirta II.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petrokimia Gresik serta Dirut Perum Jasa Tirta II, dibuka pukul 16.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari Selasa, 23 Januari 2018 dalam rangka membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan).

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petrokimia Gresik serta Dirut Perum Jasa Tirta II untuk menjelaskan mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan).
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan/pendalaman atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petrokimia Gresik serta Dirut Perum Jasa Tirta II.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI melalui Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, agar mengkaji dasar penetapan harga jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan Perum Jasa Tirta II sebesar Rp298/kWh (¢ USD 2,2/kWh) yang berada di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) Nasional berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017 yaitu sebesar (¢ USD 7,39/kWh). Selanjutnya, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk PT PLN (Persero) menetapkan harga jual beli tenaga listrik dengan harga yang wajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI melalui Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, agar melakukan koordinasi dengan Menteri terkait untuk mengusulkan pelunasan kurang bayar tagihan subsidi pupuk Pemerintah dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp17,21 Triliun, agar tidak mengganggu *cash flow* perusahaan. Komisi VI DPR RI meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan pelunasan tersebut dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan data hutang jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga dan skema pengembaliannya serta aset yang dijaminkan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.